

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM *SOCIAL ENTREPRENEURSHIP* YAYASAN
KESEJAHTERAAN MADANI KEPULAUAN RIAU PADA KELOMPOK USAHA
MADANI DI KOTA TANJUNGPINANG**

Muslim Hamdi¹, Rumzi Samin², Jamhur Poti³
170563201013@student.umrah.ac.id

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

This study aims to identify and explain the implementation and enabling and inhibiting factors Social Entrepreneurship Program of Yayasan Kesejahteraan Madani on Kelompok Usaha Madani in Tanjungpinang. This research represents research was descriptive with qualitative approach. The data collection techniques used were interviews and observations as well as using other supporting techniques in the form of literature studies, both from printed and non-printed materials such as books, scientific journal articles and other electronic sources. The analytical method used is qualitative analysis, which focuses on inferring various empirical evidence based on events that occur in the field. The results of this study indicate that the implementation of the Social Entrepreneurship-based community empowerment program at Yakesma Riau Islands has not run optimally. This conclusion was obtained from the results of research which found that there were participants who were not active in coaching. Based on the analysis of the Social Entrepreneurship program on the implementation of the program in Tanjungpinang, according to Soter C. Winter, that problems related to the inactivity of participants were caused by organizational behavior factors and the target group. impact on the empowerment and development of participants.

Keywords: *Implementation, Social Entrepreneurship, Empowerment*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dan tingkat pertumbuhannya yang signifikan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,25 %. Namun tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat akan menimbulkan permasalahan sosial yang begitu kompleks, karena semakin banyak jumlah penduduk, maka akan semakin banyak pula kebutuhan yang mesti disediakan..

Permasalahan sosial utama yang terjadi di Indonesia ialah pengangguran, kejahatan, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Dari berbagai masalah tersebut, kemiskinan menjadi masalah dasar dalam pembangunan ekonomi yang harus segera diselesaikan. Maka diperlukan upaya responsif dan solutif dari masyarakat, baik secara individu seperti wirausahawan

maupun kelompok seperti organisasi sosial. Mereka yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi ataupun kelompoknya, namun berorientasi pada kepentingan sosial masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, lahirlah sebuah gerakan yang disebut dengan *social entrepreneurship* atau kewirausahaan sosial di Kota Tanjungpinang yang diinisiasi oleh masyarakat.

Social entrepreneurship merupakan sebuah gerakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah masyarakat dalam skala besar. Gerakan ini menggunakan prinsip-prinsip seperti yang dilakukan dalam industri hanya saja tidak berorientasi pada profit namun pada nilai sosial (Wilson, 2015: 60). Salah satu keunggulan dari *social entrepreneurship* dalam membantu menguraikan permasalahan masyarakat adalah target (goal) yang tidak hanya pada hasil langsung, namun pada perbaikan sosial berskala besar. *Social entrepreneurship* dapat diartikan sebagai kegiatan kewirausahaan yang melakukan aktivitas bisnis sebagai jalan untuk mengentaskan permasalahan sosial. Konsep *social entrepreneurship* di Kota Tanjungpinang diterapkan oleh Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) dalam rangka optimalisasi proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakannya.

Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) merupakan Lembaga amil zakat nasional (Laznas) yang lahir pada 4 Juli 2011 dan berkantor pusat di Jakarta. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 17 bahwa Untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas). Awal pendiriannya, yayasan ini merupakan lembaga sosial yang memanfaatkan zakat dari para donatur, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya untuk membantu meringankan beban guru dan da'i di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan agar mereka bisa fokus dalam proses perbaikan di masyarakat. Namun berjalannya waktu, mereka bertransformasi menjadi lembaga filantropi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sama halnya dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) merupakan Lembaga Amal Zakat Nasional (Laznas) yang juga menerima zakat berupa zakat fitrah dan zakat harta (*mall*). Hanya saja dalam proses pengelolaan dana zakat, Yakesma tidak memiliki ikatan atau hubungan struktural apapun dengan Baznas. Karena sebagai lembaga sosial, mereka berhak menjalankan program berdasarkan visi misi yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Namun sebagai lembaga berbadan hukum, Yakesma Kepulauan Riau tetap melakukan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Daerah (Baznasda) Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran zakat setiap bulannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas lembaga terhadap zakat yang dikelolanya.

Kemudian pada tahun 2020, Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau melakukan optimasi pemberdayaan masyarakat dengan rumusan program yang saling berkorelasi secara berkelanjutan. Salah satu program yang saling berkorelasi yaitu program ekonomi (bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kelompok Usaha Madani) serta program dakwah (Buka Puasa Sunnah). Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Bidang Pendayagunaan bahwa “pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara kontinu agar benar-benar dapat membentuk keberdayaan, sehingga mereka dapat membangun dan mengembangkan taraf hidupnya”. Namun diantara ketiga program tersebut, yang menjadi titik tumpu dari proses korelasinya terletak pada program kelompok Usaha Madani (KUM).

Tabel 1.1 Data Penerima Bantuan Kota Tanjungpinang Tahun 2020.

No	Nama	Jumlah Bantuan (Rp)	Aktif/Tidak
1	Atika Sari	608.700	Tidak
2	Elis Eliawati	672.120	Aktif
3	Dewi Astriani	536.020	Tidak
4	Citra	1.088.220	Tidak
5	Suliana	798.700	Tidak
6	Robinson	751.520	Tidak
7	Sri Anjani	710.620	Aktif
8	Irma Sari	408.700	Tidak
9	Yusri	641.000	Tidak
10	Samsinar	569.000	Tidak
11	Maarif	2.000.000	Tidak
12	Halilah	764.000	Aktif
13	Syanti	779.700	Aktif
14	Sunarsih	779.700	Aktif
15	Marthalena	653.500	Tidak
16	Dewi Sartika	916.200	Tidak
17	Yuli Safitri	903.500	Aktif
18	Helni Novica	1.030.000	Tidak
19	Fitri Siahann	837.800	Tidak

Sumber Data: Yakesma Kepri, 2020

Social Value, yaitu bahwa kewirausahaan sosial menjalankan aktivitasnya dalam rangka menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau mengimplementasikan program *social entrepreneurship* sebagai bentuk dari pemberdayaan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berupa terciptanya kemandirian dan kesejahteraan. Namun dari 19 penerima bantuan dana, hanya 6 orang yang aktif dalam pembinaan *social entrepreneurship*.

Civil Society, yaitu bahwa kewirausahaan sosial pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat. Program *social entrepreneurship* Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau merupakan program yang dilaksanakan atas partisipasi masyarakat pemberi dan penerima zakat. Karena semua sumber pendanaan berasal dari zakat yang diberikan oleh masyarakat. Namun selama proses pembinaan kelompok usaha madani yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, beberapa peserta jarang hadir sehingga mereka tertinggal proses yang seharusnya didapatkan secara penuh.

Innovation, yaitu bahwa kewirausahaan sosial memecahkan masalah sosial melalui langkah-langkah inovatif seperti membangun keselarasan antara kearifan lokal dan inovasi sosial. Melalui Program *social entrepreneurship* Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, belum mendapatkan sentuhan inovasi yang bisa mendorong efektivitas dan efisiensi dalam proses

social entrepreneurship. Program tersebut dilaksanakan bertahap untuk memastikan agar sasaran dapat tercapai, mulai dari pemberian modal, pembinaan, pelatihan hingga pengawasan.

Economic Activity, yaitu bahwa kewirausahaan sosial yang berhasil akan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis atau ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan dalam menjalankan misi sosial organisasi. Melalui program *social entrepreneurship* Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau menghubungkan Kelompok Usaha Madani di Kota Tanjungpinang pada konsumennya. Setiap kali Yakesma melaksanakan kegiatan yang memerlukan makanan atau produk lain yang dibutuhkan, para pengusaha yang terbina selalu dilibatkan sebagai supplier atas logistik. Hal ini dilakukan agar program pemberdayaan memuat aktivitas sosial dan ekonomi yang saling terkoneksi.

Implementasi adalah “*Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” menurut Meter dan Horn dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015: 20). Implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan tersebut oleh individu atau kelompok publik atau swasta yang ditujukan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Melalui program *social entrepreneurship* yang telah direncanakan oleh Lembaga Amil Zakat (Laznas) Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau, diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana agar tujuan yang sudah ditetapkan terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Program *Social Entrepreneurship* Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau pada Kelompok Usaha Madani (KUM) di Kota Tanjungpinang”.

II. Metode Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dilakukan berada di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi tersebut dipilih karena mengingat program *social entrepreneurship* pada Kelompok Usaha Madani (KUM) yang menjadi fokus penelitian berada di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, lokasi ini ditetapkan agar penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung didapatkan dari sumbernya melalui proses wawancara dan observasi. Data ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan yang bersumber dari para informan di tempat penelitian. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperlukan yaitu proses implementasi program *social entrepreneurship* pada Kelompok Usaha Madani (KUM) di Kota Tanjungpinang, faktor pendukung dan penghambat program, dan dampak yang dihasilkan dari *social entrepreneurship* dalam program tersebut.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data ini bersumber dari data-data yang telah ada, berupa dokumen atau arsip-arsip penting, berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan, buku, jurnal ilmiah edisi cetak maupun edisi online. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen, buku, jurnal, dan berita yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperlukan yaitu kondisi ekonomi dan jumlah masyarakat miskin di Kota Tanjungpinang, profil Yayasan Kesejahteraan Madani, daftar pendapatan dan pendistribusian zakat, serta daftar masyarakat penerima manfaat zakat dalam hal ini peserta program pemberdayaan kelompok usaha madani.

III. Hasil dan Pembahasan

Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau saat ini terus melakukan pengembangan terhadap program-program pemberdayaan zakat melalui metode *social entrepreneurship* agar pemanfaatan dana umat terdistribusi secara tepat sasaran dan berdampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam bidang Pendayagunaan zakat Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau memiliki enam program yaitu program ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial kemanusiaan, dan program ramadhan. Program ekonomi terdiri dari tiga sub program diantaranya program Bantuan Usaha Madani, Kelompok Usaha Madani, dan Bina Usaha Madani. Kelompok Usaha Madani adalah program pemberdayaan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan ekonomi.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program *Social Entrepreneurship* Kelompok Usaha Madani (KUM) sebagai berikut.

1. Penyaluran bantuan

Bantuan yang disalurkan Yakesma Kepulauan Riau kepada pelaku usaha disesuaikan dengan daftar kebutuhan yang mereka ajukan dalam berkas pendaftaran. Penyaluran tersebut didasarkan pada 4 aspek yaitu kondisi ekonomi keluarga, kelayakan usaha, belum menerima bantuan serupa dari pihak lain, dan bersedia untuk dibina. Selain persyaratan secara administrasi, apabila telah memenuhi kriteria yang disebutkan, maka pelaku usaha berhak mendapatkan bantuan baik dalam bentuk uang ataupun barang. Hal tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk kepentingan usahanya, bukan untuk kebutuhan lain.

2. Pembinaan peserta

Pembinaan ini merupakan kelanjutan dari bantuan yang telah diberikan kepada pelaku usaha. Dalam pembinaan tersebut, Yakesma Kepulauan Riau melibatkan Mitra Lapangan sebagai pelaksana yang bertugas untuk memberikan materi-materi yang berkaitan dengan kewirausahaan kepada para peserta. Berikut daftar materi yang diberikan selama pembinaan.

- a. *Brainstroming* bisnis/usaha model canvas
- b. Eksekusi brand, design produk dan kemasan

- c. *Copywriting* dan teknik penjualan efektif
 - d. Efektivitas media sosial sebagai strategi penjualan
 - e. Mengatur keuangan/ cashflow bisnis dan usaha
 - f. UKM siap tumbuh dan konsisten berjalan
3. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan ini merupakan bentuk praktek atas materi-materi yang disampaikan dalam pembinaan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pembentukan *soft skill* kepada pelaku usaha sehingga bisa diaplikasikan dalam usaha yang sedang mereka jalankan. Pelatihan kewirausahaan menjadi agenda yang sangat diutamakan karena sangat mempengaruhi para pelaku usaha nantinya dalam berbisnis. Apabila pelatihan ini berjalan optimal, maka kemampuan peserta dalam mengembangkan usaha mereka juga berjalan optimal. Sehingga hak tersebut akan berefek secara langsung terhadap perekonomiannya.

4. Pengawasan pelaku usaha

Pengawasan kepada pelaku usaha merupakan upaya terakhir yang dilakukan Yakesma Kepulauan Riau dalam meningkatkan taraf perekonomian para pelaku usaha yang telah dibina. Pengawasan ini dilakukan dengan cara membangun komunikasi secara rutin dan mendatangi langsung lokasi usaha untuk memastikan usaha para peserta masih berjalan dan berkembang dengan baik sesuai dengan target dari pelaksanaan program *Social Entrepreneurship*.

Kemudian dalam pelaksanaan program *Social entrepreneurship* Kelompok Usaha Madani (KUM) Yakesma Kepulauan menyusun alur kegiatan yang dibagi menjadi beberapa tahapan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan para pelaksana dan peserta dalam menjalankan program *Social Entrepreneurship*. Tahapan pelaksanaan program *Social Entrepreneurship* Kelompok Usaha Madani adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman kepada masyarakat
2. Pembukaan masa pendaftaran
3. Pengantaran berkas pengajuan
4. Verifikasi berkas
5. Wawancara peserta
6. Survei lokasi usaha
7. Pendistribusian bantuan
8. Pembinaan dan pelatihan
9. Pengawasan terhadap usaha peserta

A. Implementasi Program *Social Entrepreneurship* Yayasan Kesejahteraan Madani Kepulauan Riau Pada Kelompok Usaha Madani di Kota Tanjungpinang

Dalam implementasinya, program *Social Entreprenurship* Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau telah memuat unsur-unsur yang menggambarkan salah satu model implementasi kebijakan menurut Soren C. Winter dalam Rahmawati (2020: 52) yaitu perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran.

Ketiga aspek tersebut yang mempengaruhi bagaimana implementasi suatu program berjalan, dalam hal ini program *Social Entrepreneurship* yang dilaksanakan pada kelompok usaha madani di Kota Tanjungpinang.

1. Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi

a. Komitmen

Komitmen Yakesma Kepulauan Riau dalam pelaksanaan program *Social Entrepreneurship* yaitu berupa keberanian dalam mendistribusikan sejumlah dana untuk pembiayaan modal usaha kepada para pelaku usaha yang telah mendaftarkan diri dalam program tersebut. Sejak diluncurkan bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2020, Yakesma kepulauan Riau telah mengucurkan dana sebesar sebesar Rp. 28.811.879 untuk 23 mustahik pelaku usaha mikro. Para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan telah melewati proses verifikasi administrasi dan observasi lokasi yang dilakukan oleh mitra lapangan Yakesma kepulauan Riau.

Kemudian bentuk komitmen dari pengurus Yakesma Kepulauan Riau selaku pelaksana program *Social Entrepreneurship* yaitu keseriusan dalam menjalankan program, mulai dari sosialisasi program *Social Entrepreneurship* ke rumah pelaku usaha, melayani masyarakat dalam proses pendaftaran, verifikasi berkas pengajuan bantuan, kunjungan dan survei ke lokasi usaha calon penerima bantuan program *Social Entrepreneurship*, penyaluran bantuan modal atau peralatan usaha langsung ke rumah pelaku usaha peserta program *Social Entrepreneurship* sampai pada tahap pembinaan dan pelatihan kewirausahaan. Apabila komitmen ini dilaksanakan secara konsisten, maka tentunya akan terbentuk kemandirian masyarakat pelaku usaha sehingga selanjutnya tidak mengalami ketergantungan terhadap bantuan modal dan terwujudnya kesejahteraan mustahik masyarakat di Kota Tanjungpinang.

b. Koordinasi

Implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan, menurut Meter dan Horn dalam Maturbongs (2012). Koordinasi eksternal antara Laznas Yakesma Kepulauan Riau dengan Baznas Provinsi Kepulauan Riau hanya dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan penggunaan anggaran setiap tahunnya dan daftar penerima manfaat zakat agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih. Koordinasi yang dibangun belum optimal karena belum pernah dilaksanakan koordinasi antara instansi terkait yang secara khusus membahas program *Social Entrepreneurship*. Sementara koordinasi antara Yakesma Kepulauan Riau dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Pemerintah Kota Tanjungpinang hingga hari ini belum pernah dilakukan. Sejauh ini, instansi yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program *Social Entrepreneurship* hanya Yakesma Kepulauan Riau.

Akan tetapi kedepannya, Yakesma Kepulauan Riau akan berupaya untuk terus meningkatkan koordinasi kepada Instansi terkait guna mengembangkan program *Social Entrepreneurship*.

Koordinasi internal Yakesma Kepulauan Riau dalam pelaksanaan program *Social Entrepreneurship* sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pola koordinasi yang terstruktur mulai dari Mitra Lapangan yang selalu berkoordinasi dengan Koordinator program *Social Entrepreneurship*

untuk membahas progres dari para peserta yang tergabung dalam Kelompok Usaha Madani, kemudian Koordinator program berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pendayagunaan Yakesma Kepulauan Riau untuk mengadakan kunjungan langsung ke lokasi pelaku usaha, dan selanjutnya Kepala Bidang Pendayagunaan berkoordinasi dengan kepala Cabang Yakesma Kepulauan Riau untuk melaporkan perkembangan program *Social Entrepreneurship*. Koordinasi yang dilakukan antara Yakesma Pusat dengan Yakesma cabang dalam hal ini Kepulauan Riau sudah terintegrasi secara baik.

Secara Eksternal, Yakesma Kepulauan Riau belum melakukan koordinasi kepada pemerintah kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sebagai lembaga pemerintah yang berhubungan dengan program *Social Entrepreneurship* tersebut. Terlepas dari hal itu Dinas Sosial kota Tanjungpinang mengapresiasi program *Social Entrepreneurship* yang dilaksanakan Yakesma Kepulauan Riau karena telah membantu pemerintah daerah kota Tanjungpinang dalam mengentaskan masalah kemiskinan masyarakat kota Tanjungpinang. Karena dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat memerlukan kerja sama dari masyarakat itu sendiri, baik perindividu ataupun kelompok seperti yang dilakukan Yakesma Kepulauan Riau.

2. Perilaku Birokrasi Level Bawah

a. Kontrol Organisasi

Kontrol organisasi berguna dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh para pengurus, baik di luar maupun di dalam lingkungan kerja sehingga staf dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam implementasi program *Social Entrepreneurship*, kontrol organisasi tetap dilakukan secara sistematis dengan pendekatan *Top Down* oleh Ketua Yakesma Kepulauan Riau ke Bidang Pendayagunaan, kemudian Ketua Bidang Pendayagunaan mengawasi Koordinator Program dan mitra lapangan. Pengawasan juga dilakukan oleh Koordinator Program terhadap para pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan bantuan dan tergabung dalam program *Social Entrepreneurship* Kelompok Usaha Madani secara rutin untuk melihat perkembangan dari usaha yang dijalankan.

Kontrol organisasi yang dilakukan dalam implementasi program *Social Entrepreneurship* pada kelompok usaha madani di kota Tanjungpinang hanya dilakukan oleh Yakesma Kepulauan Riau. Pengawasan yang mereka lakukan tidak melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial kota Tanjungpinang sebagai lembaga yang berhubungan dengan ruang lingkup dari program *Social Entrepreneurship*. Hal tersebut terjadi karena Yakesma Kepulauan Riau tidak melakukan koordinasi kepada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang terkait pelaksanaan program *Social Entrepreneurship* tersebut, sehingga pemerintah kota Tanjungpinang tidak mengetahui secara menyeluruh bagaimana program tersebut berjalan untuk selanjutnya dilakukan pengawasan.

b. Profesionalisme Pengurus

Aspek sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses implementasi program *Social Entrepreneurship*, karena jika sumber daya manusianya lemah maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting karena menyangkut kompetensi pelaksana sehingga akan mempengaruhi efektivitas implementasi program

Social Entrepreneurship tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja para pelaksana program sangat baik dan ditunjang dengan profesionalisme pengurus yang berkompeten di bidangnya. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah implementor atau pelaksana program cukup profesional karena penempatan tugas dilakukan secara selektif berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditentukan Yakesma Kepulauan Riau.

Para pelaksana program *Social Entrepreneurship* telah memiliki pengalaman kerja, hal ini terbukti dari koordinator program yang merupakan pelaku usaha berbasis digital di Kota Tanjungpinang sesuai dengan kondisi para pelaku usaha yang mengalami ketertinggalan perkembangan teknologi dimana sekarang hal tersebut sangat dibutuhkan dalam berwirausaha. Koordinator Program *Social Entrepreneurship* dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman pada standar operasional prosedur yang telah ditentukan oleh Yakesma Kepulauan Riau. Para pelaksana (Koordinator program dan Mitra lapangan) yang berjumlah 5 orang sudah mencukupi untuk pelaksanaan program, terlihat dari tidak adanya hambatan yang dialami selama kegiatan berlangsung.

Kemudian Pengurus Yakesma Kepulauan Riau memberikan pelayanan kepada masyarakat pelaku usaha yang mengikuti program secara profesional melalui standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pelaku Usaha yang berkunjung ke Kantor Yakesma Kepulauan Riau untuk melakukan pengajuan program harus memenuhi beberapa persyaratan administratif sebelum dapat menerima bantuan dan pembinaan dalam program *Social Entrepreneurship*. Pelaksana program dalam hal ini Mitra lapangan melakukan survei ke tempat pelaku usaha peserta program *Social Entrepreneurship* untuk menilai usaha yang dapat diberikan bantuan dan diikutsertakan dalam program pembinaan *Social Entrepreneurship* Kelompok Usaha Madani di Kota Tanjungpinang.

3. Perilaku Kelompok Sasaran

a. Respon Positif

Dukungan publik terhadap suatu kebijakan sangat diperlukan, karena tanpa dukungan kelompok sasaran maka kebijakan tidak akan maksimal dijalankan, sebagaimana disampaikan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Maturbongs (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat atau pelaku usaha yang menjadi peserta Program *Social Entrepreneurship* di Kota Tanjungpinang sangat mendukung dan mengapresiasi program tersebut. Melalui program *Social Entrepreneurship* pelaku usaha mikro yang kurang mampu dapat mengakses pembiayaan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Selain pemberian bantuan modal usaha, masyarakat pelaku usaha juga mendapatkan pembinaan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan mereka dalam beriwusaha. Beberapa pelaku usaha peserta program *Social Entrepreneurship* yang sebelumnya mustahik sekarang telah berubah statusnya menjadi muzakki karena bantuan dan pelatihan yang mereka terima sebelumnya.

Program *Social Entrepreneurship* ini telah efektif dilaksanakan di Kota Tanjungpinang berdasarkan jumlah mustahiq yang berkurang dan muzakki yang bertambah serta meningkatnya pendapatan pelaku usaha yang terbina. Dengan adanya program *Social Entrepreneurship* masyarakat pelaku usaha sangat terbantu untuk mendapatkan penghasilan tambahan ditengah krisis ekonom akibat pandemi Covid-19. Bantuan modal usaha dari Yakesma Kepulauan Riau lebih

mudah didapatkan dibandingkan bantuan modal usaha dari lembaga bantuan lainnya karena persyaratan administrasi yang mudah, modal yang diberikan mencukupi serta pelayanan dari Pengurus dan Mitra Lapangan Yakesma Kepulauan Riau yang responsif dan cepat tanggap.

b. Respon Negatif

Respon negatif dari pelaku usaha terhadap implementasi program *Social Entrepreneurship* Kelompok Usaha Madani di Kota Tanjungpinang yaitu waktu pembinaan dan jumlah pertemuan yang begitu singkat yaitu 6 kali pertemuan selama 3 bulan. Hal tersebut mengakibatkan materi-materi yang diberikan selama pembinaan tidak mampu diterima secara penuh oleh sebagian peserta sehingga sulit untuk mempraktekkan dalam usahanya. Namun di luar daripada itu, bantuan yang diberikan oleh Yakesma Kepulauan Riau sudah sangat membantu masyarakat dalam menutupi keuangan usahanya yang terdampak pandemi Covid-19.

Kemudian sikap pelaku usaha yang telah mendapatkan bantuan, namun tidak aktif di dalam pembinaan merupakan salah satu bentuk respon negatif masyarakat yang mengakibatkan program *Social Entrepreneurship* tidak berjalan secara optimal. Ketidaktifan mereka dalam pembinaan dan pelatihan yang diadakan Yakesma Kepulauan Riau sebagai kelanjutan dari bantuan yang diberikan sebelumnya disebabkan oleh berbagai alasan. Mulai dari sibuk dengan pekerjaan rumah, sibuk mengurus keluarga, dan ada juga karena tidak memiliki kendaraan. Namun terlepas dari alasan para pelaku usaha tidak aktif dalam program pembinaan merupakan satu bentuk ketidak kooperatifan masyarakat yang berdampak pada pencapaian akhir program *Social Entrepreneurship*.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program *Social Entrepreneurship* Yayasan Kesejahteraan Madani pada Kelompok Usaha Madani di Kota Tanjungpinang

Program *Social Entrepreneurship* yang dilaksanakan oleh Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau, khususnya untuk kelompok usaha madani di Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang menjadi bagian dalam implementasinya di lapangan. Adanya faktor pendukung tentunya memberikan kekuatan dalam pelaksanaan program *Social Entrepreneurship*, sedangkan faktor penghambat memberikan hal sebaliknya yaitu menjadi kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dirasakan langsung oleh pihak-pihak yang terlibat, baik pengurus Yakesma Kepulauan Riau, para pelaksana lapangan maupun peserta itu sendiri.

Faktor pendukung dalam implementasi program *Social Entrepreneurship* ini yaitu sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Kesiapan pelaksana dalam memberikan pelatihan dan kesungguhan peserta dalam mengikutinya menjadi dua hal yang seharusnya berdampingan. Hal tersebut telah ada dalam implementasi program *Social Entrepreneurship* pada kelompok usaha madani di Kota Tanjungpinang. Keberadaan aspek tersebut tergambar dari perilaku peserta yang aktif selama pembinaan berlangsung, sehingga pelaksana yang merasakan semangat mereka untuk belajar juga turut bersemangat untuk membinanya. Selain itu, dana zakat yang diberikan oleh para muzakki juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi program *Social Entrepreneurship* tersebut. Karena adanya dana zakat merupakan bentuk dukungan dari masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Yakesma Kepulauan Riau.

Kemudian selain faktor pendukung, program *Social Entrepreneurship* kelompok usaha madani di Kota Tanjungpinang juga berhadapan dengan persoalan di lapangan yang menjadi

penghambat dalam proses implementasi. Faktor penghambat dalam implementasi program *Social Entrepreneurship* ini yaitu tingkat pendidikan peserta, kondisi keluarga, dan sumber daya teknologi. Untuk bisa mensukseskan program *Social Entrepreneurship* diperlukan dukungan dari berbagai aspek yang berjalan secara seimbang. Namun apabila yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara antar berbagai aspek, maka implementasi program *Social Entrepreneurship* tidak akan berjalan optimal.

Keberadaan faktor penghambat dalam implementasi program *Social Entrepreneurship* terlihat dari perilaku masyarakat yang menjadi peserta tidak memperlihatkan kesungguhan untuk meningkatkan tarafnya. Sebagaimana yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat yang telah menerima bantuan tidak aktif dalam pembinaan, bahkan mereka yang aktif juga mengalami kendala berupa kesulitan untuk menangkap materi karena tingkat pendidikannya yang rendah. Kemudian, kondisi peserta dalam kehidupan keluarganya juga menjadi faktor penghambat. Sebagaimana dialami oleh salah satu peserta yang sibuk mengurus pekerjaan rumah sehingga kesulitan mengatur waktu untuk hadir di pelatihan. Selain itu, kemampuan peserta dalam menggunakan teknologi dalam hal ini handphone atau laptop juga menjadi faktor penghambat dalam pelatihan, karena ketika materi yang disampaikan berkaitan atau membutuhkan alat tersebut mereka akan lebih sulit mengerti apalagi menerapkannya.

IV. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program *Social Entrepreneurship* Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau pada Kelompok Usaha Madani di Kota Tanjungpinang belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari penerima bantuan yang tidak aktif dalam pembinaan, waktu pembinaan yang singkat, dan usaha masyarakat peserta yang tidak berkembang (stagnan). Belum optimalnya implementasi program *Social Entrepreneurship* tersebut juga tergambar dalam setiap variabel berikut:

1. Perilaku organisasi dan antar organisasi dalam program *Social Entrepreneurship* dengan dimensi komitmen dan koordinasi belum berjalan optimal. Komitmen Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) dibuktikan dengan bantuan langsung kepada pelaku usaha sesuai kebutuhan dan syarat administrasi yang mudah sehingga tidak memberatkan mereka. Kemudian koordinasi internal Yakesma Kepulauan Riau telah dilakukan secara terstruktur dan sistematis, namun secara eksternal belum ada koordinasi khusus mengenai program *Social Entrepreneurship* ini kepada lembaga terkait dalam hal ini Baznasda Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UMK) Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.
2. Perilaku birokrasi level bawah dengan dimensi kontrol organisasi dan profesionalisme pengurus juga sudah berjalan optimal. Kontrol organisasi dari Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau telah dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga implementasi program *Social Entrepreneurship* tersebut berjalan sesuai rencana. Para pelaksana terus melakukan pembinaan dan para pelaku usaha terus mengembangkan usahanya. Kemudian profesionalisme pengurus dapat dilihat dari proses perekrutan yang selektif sesuai standar kriteria dari Yakesma Kepulauan Riau

sehingga menempatkan pelaksana sesuai dengan kompetensi di bidangnya, selanjutnya pengurus melaksanakan program sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang berlaku.

3. Perilaku Kelompok Sasaran dalam Implementasi Program *Social Entrepreneurship* Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma) Kepulauan Riau berisi respon positif dan respon negatif. Respon positif dari program tersebut dapat dilihat dari usaha peserta untuk aktif dalam setiap pertemuan, memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk mengembangkan usaha, dan terlibatnya pelaku usaha yang terbina dalam program-program lain yang diadakan Yakema Kepulauan Riau. Sedangkan respon negatif dari program ini dapat dilihat dari pelaku usaha yang mendapatkan bantuan namun tidak aktif dalam pembinaan, sehingga bantuan yang diberikan melalui program *Social Entrepreneurship* tidak termanfaatkan secara tepat.

V. Daftar Pustaka

BUKU:

- Alfatih, Andi (2010). *Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*. Bandung: Pers Unpad.
- Hery Wibowo dan Soni A. Nulhaqim (2015). *Kewirausahaan Sosial, Merevolusi Pola Pikir Dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*. Bandung: UNPAD Press.
- Meleong, J Lexy (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Rosda: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Solichin Abdul wahab (2014). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik*. Samarinda: Bumi Aksara.

JURNAL:

- Akmarul Rijal dkk. *Kewirausahaan Sosial pada lembaga zakat nasional berkantor pusat di Surabaya*. Jurnal Human Falah. Vol. 5. No. 1
- Dimas Alif Budi N. Dkk. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)*. Jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang. Vol.1, No. 5 Hal. 862-871.
- Suryanto, A. *Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol 1. Hal. 85-106.

SKRIPSI :

Ilham Siduppa (2020) dengan judul *“Implementasi Program Baznas Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Maros”*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Siti Faiqotun Nikmah (2017) dengan judul *“Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Di Desa Dukuhsети Kecamatan Dukuhsети Kabupaten Pati Tahun 2015”*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Sofia Nurjanah (2015) dengan judul *“Strategi Dan Kontribusi Kegiatan Social Entrepreneurship Dalam Pemberdayaan Anak Muda Di Komunitas Sahabat Muda Yayasan Lagzis Peduli Surabaya”*. Universitas Negeri Sunan Ampel.

DOKUMEN:

Hasil Sensus Penduduk Kepulauan Riau Tahun 2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. Berita Resmi Statistik No. 07/01/21/Th. XVI, 21 Januari 2021

Daftar Hadir Pembinaan Usaha Kecil Mikro Bina Zakat Produktif Yayasan Kesejahteraan Madani Kepulauan Riau Tahun 2020.

Data Anggaran Program Bina Usaha Zakat Produktif Yayasan Kesejahteraan Madani Kepulauan Riau Tahun 2020.

INTERNET:

Profil Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani <http://yakesma.org/>

Profil Selayang Pandang Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang <https://www.tanjungpinangkota.go.id/pages/profil>

Publikasi Kegiatan Bantuan Usaha Kecil Mikro Yayasan Kesejahteraan Madani Kepulauan Riau Kepada Masyarakat Kota Tanjungpinang <https://suarasiber.com/2020/11/yakesma-kepri-bantu-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19/>